

# PENGARUH OPINI AUDIT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

**Anthonius H. Citra Wijaya, SE., M.Sc., Ak., CA<sup>1</sup>**

**Andika Rante, SE., M.SA<sup>2</sup>**

**Putri Inda Ramandey<sup>3</sup>**

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih*

## **ABSTRACT**

*This study aims to obtain empirical evidence about the effect of audit opinion on the performance of local governments with the realization of regional revenues and expenditures as an intervening variable in empirical studies in district and city governments in the Papua Province. Regional income is reflected in the value of absolute logarithm natural total Regional Original Income. Regional expenditure is reflected in the value of absolute natural logarithms in total Operating Expenditures. Government performance is reflected in the score of the evaluation results of SAKIP implementation. This study used 28 districts and 1 city as samples from local governments in Papua Province. The sample is determined using purposive sampling. The results of this study indicate that the audit opinion does not have a direct effect on the performance of the local government or after it has been mediated by local revenue and operating expenses. Audit opinion affects Regional Original Revenue. Regional Original Income does not affect the Performance of Local Governments. Audit Opinion has an effect on Operational Expenditures and Shopping Expenditures does not affect the Performance of Local Government.*

**Keywords :** *Audit Opinion, Performance, Income, Shopping, Papua Province*

## **1. PENDAHULUAN**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk diselenggarakan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia yang salah satunya diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Indonesia memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah daerah untuk menyelenggarakan semua urusan Pemerintah khususnya pada pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2004 tentang Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah menjelaskan bahwa setiap Pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah harus mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga penyelenggaraan urusan Pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi efektif dan efisien.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD mengandung pengertian sebagai suatu informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi (Halim, 2007:94) dan merupakan tahapan selanjutnya setelah Pemerintah melakukan tugas-tugasnya yang dituang dalam APBD. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu entitas telah melaksanakan tujuan entitas tersebut (Fahmi, 2012:2). Pengukuran yang bersumber dari informasi finansial, seperti laporan keuangan, diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat (Mardiasmo, 2009:123). Oleh karena itu, kinerja keuangan Pemerintah daerah menjadi suatu hal yang penting baik bagi Pemerintah daerah maupun bagi pihak eksternal. Kinerja Keuangan Pemerintah menjadi salah satu ukuran untuk meninjau kemampuan Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan (audit) keuangan negara terhadap LKPD, hasil pemeriksaan BPK tersebut berupa Opini audit. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara menyatakan bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

BPK Perwakilan Papua memeriksa 29 Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Papua atas LKPD yang di serahkan masing- masing daerah. Terlihat adanya Pemerintah daerah yang opininya tetap sama seperti tahun sebelumnya bahkan ada Pemerintah daerah yang opini atas laporan keuangan meningkat dari opini tahun sebelumnya. Namun ada juga opini Pemerintah yang belum mengalami perbaikan dari hasil pemeriksaan tahun sebelumnya untuk LHP atas LKPD tahun anggaran 2016. Delapan daerah Kabupaten/Kota dan Pemprov Papua atau delapan LHP atas LKPD 2016 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Delapan Kabupaten/Kota yang mendapat opini WTP antara lain Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kepulauan Yapen, Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika. Hasil penelitian sebelumnya dari Mustikarini dan Fitriyani (2012) dan Marfiana dan Kurniasih (2013) menunjukkan bahwa realisasi pendapatan berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah daerah.

Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi pendapatan daerah dapat menjadi pemediasi pengaruh opini audit terhadap kinerja Pemerintah Daerah, begitu juga dengan realisasi belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah daerah (walaupun hasilnya masih beragam) dapat dikatakan bahwa realisasi belanja daerah dapat juga menjadi pemediasi pengaruh opini audit terhadap kinerja Pemerintah daerah. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Andi Chairil (2015) dimana opini audit atas LKPD diasumsikan berfungsi sebagai dasar legitimasi yang diberikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Pemerintah Daerah, khususnya masyarakat daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah (Pendapatan Asli Daerah/ PAD) akan meningkat ketika opini audit sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap pencapaian realisasi pendapatan Pemerintah daerah khususnya PAD.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh opini audit terhadap kinerja pemerintah daerah dengan realisasi pendapatan dan belanja daerah sebagai variabel intervening studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Papua.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Teori Legitimasi**

Asumsi dasar teori legitimasi seperti yang dinyatakan Suchman (1995) adalah bahwa legitimasi terhadap organisasi akan terbentuk ketika terdapat kondisi perilaku organisasi yang sejalan dengan harapan pihak-pihak disekitar organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya, sehingga kesesuaian ataupun ketidaksesuaian organisasi dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya akan berkonsekuensi terhadap legitimasi serta kinerja dan pencapaian tujuan organisasi tersebut. Ketika legitimasi terhadap organisasi menjadi berkurang maka akan berkonsekuensi pada berkurangnya aliran sumberdaya yang diterima dan berdampak buruk pada pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk merancang dan mengelola kelembagaan organisasi dalam rangka melindungi ataupun menjaga legitimasi. Hal ini senada juga dengan pernyataan Power (2003) yang menyatakan bahwa dengan semakin besarnya tuntutan atas transparansi dan akuntabilitas organisasi saat ini maka audit berperan penting dalam memproduksi legitimasi.

Dalam konteks penelitian ini, dengan mempertimbangkan besarnya kebutuhan Pemerintah daerah terhadap legitimasi masyarakat dan Pemerintah dalam mendukung pelaksanaan dan pembiayaan program pembangunan daerah maka Pemerintah daerah akan selalu berupaya untuk meningkatkan kredibilitasnya, terutama terkait dengan pengelolaan keuangan daerah yang ditandai dengan pencapaian opini yang baik.

## 2.2 Teori Pilihan Publik (*Public Choice Theory*)

Asumsi dasar teori pilihan publik dikembangkan dari ilmu ekonomi dan ilmu politik yang mengasumsikan bahwa individu akan menunjukkan perilaku rasional dengan memaksimalkan utilitas mereka (Schneider dan Damapour, 2002), sehingga paradigma pilihan publik ini dapat digunakan untuk mengevaluasi keputusan pembelanjaan publik berdasarkan insentif aktor utama yang terlibat dalam proses.

Dari perspektif teori pilihan publik, meskipun peran utama birokrat (aparatur Pemerintah) menjalankan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, namun birokrat sering terlibat dalam penetapan kebijakan dan menggunakan pengetahuan (informasi) khusus mereka untuk mempengaruhi dan membatasi pilihan masyarakat. Dengan kata lain, birokrat akan menggunakan wewenang yang mereka miliki dalam mengelola sumber daya semata-mata bertujuan untuk memenuhi kepentingan pribadinya, termasuk dalam menentukan kebijakan penganggaran pembelanjaan publik (Giroux dan Shields, 1993).

Dalam literatur pilihan publik, pemilih (masyarakat) digambarkan sebagai pihak yang relatif kurang memiliki informasi tentang keputusan politik (Giroux dan Shields, 1993). Kondisi ini kemudian menyebabkan birokrat memiliki insentif untuk membuat kebijakan yang tidak sepenuhnya diketahui dasar penetapannya oleh masyarakat atau tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga dampaknya terjadi kehilangan kontrol (*control-loss*) dalam penyediaan barang publik, baik berupa kelebihan pasokan barang publik maupun produksi barang publik yang tidak efisien, terutama akibat kelalaian birokrat (Giroux dan Shields, 1993). Selain itu, dengan orientasi yang hanya mementingkan diri sendiri maka birokrat senantiasa akan membuat program yang lebih besar dan berupaya untuk meningkatkan kekuatan dan pengaruh mereka.

Oleh karenanya diperlukan suatu mekanisme yang dapat mencegah distorsi informasi sekaligus mengontrol perilaku birokrat tersebut. Disinilah peran penting fungsi akuntansi dan audit dalam Pemerintahan, karena sebagaimana ditemukan (Giroux dan Shield, 1993) bahwa opini audit, khususnya opini wajar tanpa pengecualian sangat efektif sebagai alat kontrol dan mengurangi insentif birokrat untuk melakukan pembelanjaan publik.

## 2.3 Audit Pemerintahan

Audit sektor publik/Pemerintah adalah pemeriksaan terhadap Pemerintah yang dilakukan untuk mengetahui pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas pengelolaan dana masyarakat (*public money*). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat tiga jenis audit keuangan Negara, yaitu:

- a. Audit Keuangan
- b. Audit kinerja
- c. Audit dengan tujuan tertentu

## 2.4 Kinerja Pemerintah

Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi No. 12 tahun 2015 tentang Evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) mendefinisikan Kinerja sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Evaluasi terhadap penerapan SAKIP dilakukan untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah daerah yang meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja.

## 2.5 Pengembangan Hipotesis

Terkait dengan fungsi dan tanggungjawab yang diemban oleh Pemerintah daerah, maka untuk mendukung penyelenggaraan aktivitasnya, Pemerintah daerah membutuhkan legitimasi dari Pemerintah dan masyarakat sebagai *stakeholders* utamanya. Legitimasi dari Pemerintah diperlukan untuk meningkatkan dukungan dalam pelaksanaan program-program daerah, sedangkan legitimasi

dari masyarakat dibutuhkan oleh Pemerintah daerah karena selain untuk mendukung kelancaran aktivitas Pemerintah, juga agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan daerah, misalnya dengan cara membayar pajak/retribusi daerah ataupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya. Andi Chairil, mengadakan penelitian menggunakan data 32 Pemerintah Provinsi di Indonesia dengan 150 observasi (Provinsi-tahun) selama tahun 2010-2014 mengemukakan bahwa Opini BPK mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah. Dari uraian di atas ditarik hipotesis sebagai berikut:

*H1: Terdapat hubungan antara opini audit terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua*

Birokrat dengan pengetahuan khusus mereka sering terlibat dalam penetapan kebijakan yang membatasi pilihan masyarakat, dimana masyarakat tidak mengetahui dasar penetapannya atau dengan kata lain tidak sesuai dengan keinginan masyarakat termasuk didalamnya menentukan kebijakan pembelanjaan publik (Schneider dan damapour, 2002 dalam Andi Chairil, 2015). Hasil penelitian Andi Cahiril (2015), salah satunya mengenai hubungan opini audit terhadap kinerja Pemerintah daerah dengan belanja operasi daerah sebagai variabel mediasi, ketika menggunakan pengukuran yang berbeda yaitu pengukuran nilai *absolute* realisasi belanja daerah tidak ditemukan adanya pengaruh yang signifikan opini audit terhadap nilai realisasi belanja daerah dan ketika menggunakan persentase realisasi belanja operasi daerah atas total belanja ditemukan adanya pengaruh yang positif signifikan opini audit terhadap nilai realisasi belanja operasi. Oleh karena itu, hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut:

*H2: Terdapat hubungan antara opini audit terhadap belanja operasi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua*

Pertumbuhan ekonomi yang positif akan mendorong investasi yang juga mendorong peningkatan perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur yang baik serta investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD daerah tersebut. Peningkatan PAD tersebut seharusnya didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, dimana kualitas layanan publik yang baik akan yang mencerminkan kinerja yang baik suatu Pemerintah daerah. Penelitian Marfiana dan Kurniasih (2013) dengan menemukan adanya pengaruh positif realisasi PAD terhadap kinerja Pemerintah daerah, hasil yang sama juga ditemukan oleh Mustikarini dan Fitriasari (2012) bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Pemerintah. Oleh karena itu hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

*H3: Terdapat hubungan antara pendapatan asli daerah terhadap Kinerja Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua*

Belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan urusan wajib dan pelayanan lain di bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan fasilitas sosial, fasilitas umum dan pengembangan system jaminan sosial (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1). Ketika belanja daerah meningkat, semakin tinggi juga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, maka akan berpengaruh pada skor kinerja pemerintah daerah tersebut.

Terdapat hasil Penelitian yang berbeda nilai realisasi belanja daerah terhadap kinerja Pemerintah daerah. Mustikarini dan Fitriasari (2012) menghasilkan bahwa realisasi belanja daerah dengan kinerja Pemerintah daerah berpengaruh negatif, sedangkan Marfiana dan Kurniasih (2013) menemukan pengaruh yang positif nilai realisasi belanja daerah dengan kinerja Pemerintah daerah. Oleh karena itu, hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

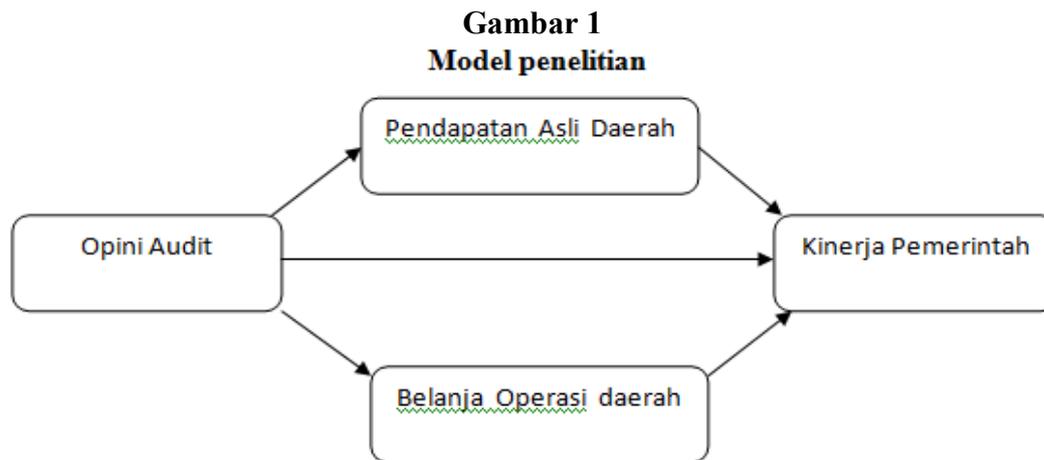
*H4: Terdapat hubungan antara Belanja operasi daerah terhadap Kinerja Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua*

Opini merupakan pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini audit BPK dapat menjadi tolak ukur untuk menilai sebuah akuntabilitas sebuah entitas Pemerintah. Hasil penelitian Budianto (2012)

yang menggunakan sampel 1.082 Pemerintah kabupaten/kota di Indonesia periode tahun 2008-2010 yang menemukan bahwa opini audit dan variabel lainnya seperti jenis kelamin pemimpin Pemerintah daerah, jumlah Pendapatan Asli Daerah dan total asset daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah daerah. Budianto (2012) juga menjelaskan bahwa pada Pemerintah daerah yang memiliki rata-rata opini audit yang rendah kecenderungan memiliki skor kinerja yang rendah dibandingkan dengan Pemerintah daerah yang memiliki rata-rata opini audit yang tinggi. Hal yang sama juga dari hasil penelitian Andi Chairil (2015) bahwa opini audit BPK berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap kinerja. Oleh karena itu, hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

*H5: Terdapat hubungan antara Opini Audit dan kinerja Pemerintah Daerah*

## 2.6 Model Penelitian



Sumber: Penulis (2018)

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Populasi dan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria-kriteria yang ditentukan berdasarkan kebijakan peneliti. Penelitian ini menggunakan kriteria pengambilan sampel berikut: Pemerintah daerah kabupaten/kota seluruh Papua yang menerbitkan laporan keuangan Pemerintah pada tahun 2012-2016 di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Papua; laporan keuangan Pemerintah daerah yang mencantumkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengukuran variabel dan analisis data untuk pengujian hipotesis dalam penelitian pemerintah daerah Kabupaten/Kota seluruh Papua yang memiliki evaluasi kinerja tahun 2012-2016.

$$Y_{PD} = b_0 + b_{OA}X_{OA} + e_1 \dots \dots \dots \text{Persamaan Regresi 1}$$

$$Y_{BO} = b_0 + b_{OA}X_{OA} + e_2 \dots \dots \dots \text{Persamaan Regresi 2}$$

$$Y_{KP} = b_0 + b_{OA}X_{OA} + b_{PD}X_{PD} + b_{BO}X_{BO} + e_1 \dots \dots \dots \text{Persamaan Regresi 3}$$

Keterangan:

$Y_{OP}$  = Opini Audit

$Y_{PD}$  = Pendapatan Asli Daerah

$Y_{BO}$  = Belanja Operasi

$Y_{KP}$  = Kinerja Pemerintah Daerah

$b_{OP}$  = *Intercept* Opini Audit

$b_{PD}$  = *Intercept* Pendapatan Asli Daerah

$b_{BO}$  = *Intercept* Belanja Operasi

$b_{KP}$  = *Intercept* Kinerja Pemerintah Daerah

$e_1$  = Residual Pendapatan Asli Daerah

$e_2$  = Residual Belanja Operasi

$e_3$  = Residual Kinerja Pemerintah Daerah

### 3.2 Definisi Operasional

**Tabel 1**  
**Definisi Operasional**

Variabel	Indikator
<b>Independen</b> Opini Audit	Opini BPK atas pemeriksaan LKPD Provinsi Papua. a. Wajar Tanpa Pengecualian = 5 b. Wajar Tanpa pengecualian dengan Paragraf Penjelas = 4 c. Wajar dengan Pengecualian = 3 d. Tidak Wajar = 2 e. Tidak Memberikan Pendapat = 1
<b>Intervening</b> Pendapatan Asli Daerah	Logaritma natural nilai absolut jumlah PAD
Belanja Operasi	Logaritma natural nilai absolut jumlah belanja Operasi
<b>Dependen</b> Kinerja Pemerintah daerah	Skor Hasil evaluasi implementasi SAKIP a. AA = >85-100/memuaskan; = 6 b. A = > 75-85/sangat baik; = 5 c. B = > 65-75/baik; = 4 d. CC = >50-65/cukup; = 3 e. C = > 30-50/kurang; dan = 2 f. D = > 0-30/sangat kurang. = 1

Sumber: Penulis (2018)

## 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Sampel dan Data

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria-kriteria yang ditentukan berdasarkan kebijakan peneliti. Penelitian ini menggunakan kriteria pengambilan sampel berikut: Pemerintah daerah kabupaten/kota seluruh Papua yang menerbitkan laporan keuangan Pemerintah pada tahun 2012-2016 di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Papua; laporan keuangan Pemerintah daerah yang mencantumkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengukuran variabel dan analisis data untuk pengujian hipotesis dalam penelitian pemerintah daerah Kabupaten/Kota seluruh Papua yang memiliki evaluasi kinerja tahun 2012-2016. Tahun data hanya bisa sampai 2016 karena keterbatasan akses data pada BPK RI Kantor Perwakilan Provinsi Papua dan waktu penelitian.

### 4.2 Deskripsi Statistik

Data Statistik pada Tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata Opini audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah berada pada kategori wajar tanpa pengecualian dengan paragraph penjelas. Dengan standar deviasi 1.51771. Pendapatan Asli Daerah menunjukkan nilai rata-rata 25.0133 dengan standar deviasi 1.08659. Nilai minimum sebesar 22.56 yang dimiliki oleh Kabupaten Keerom sedangkan nilai maksimum sebesar 26.57 dimiliki oleh Kabupaten Mimika.

Belanja Operasi menunjukkan nilai rata-rata 27.4010 dengan standar deviasi 0.77173. Nilai Minimum sebesar 26.63 yang dimiliki oleh Kabupaten Keerom sedangkan nilai maksimum 30.45 yang dimiliki oleh Kabupaten Mimika. Skor Kinerja LAKIP menunjukkan bahwa rata-rata skor kinerja berada pada kategori Kurang (C = 30-50%). Dengan standar deviasi 0.37905.

**Tabel 2**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximun	Mean	Std. Deviation
<b>Opini</b>	30	1.00	5.00	3.2000	1.51771
<b>PAD</b>	30	22.56	26.57	25.0133	1.08659
<b>BO</b>	30	25.63	30.45	27.4010	0.77173
<b>Kinerja</b>	30	1.00	2.00	1.8333	0.37905
Valid N (listwise) 30					

*Sumber:* Data sekunder diolah (2018)

#### 4.3 Pengujian Model Penelitian Dan Analisis Path

Pengujian asumsi klasik untuk mengetahui kenormalan data yang digunakan dalam penelitian. Hasil menunjukkan bahwa dalam model penelitian ini tidak terdapat masalah normalitas, multikoloniaritas, heterokedasitas, maupun autokorelasi.

**Tabel 3**  
**Hasil Regresi**

Model	Variabel bebas	Variabel terikat	Koefisien path	t- value	Sig.	Ajd R Square
Pers. Reg 1	Opini	PAD	0.472	4.645	0.000	0.415
Pers. Reg 2	Opini	BO	0.252	3.019	0.005	0.219
Pers. Reg 3	Opini	Kinerja	0.068	1.163	0.256	0.113
	PAD		0.071	0.722	0.477	
	BO		0.014	0.117	0.908	

*Sumber:* Data sekunder diolah (2018)

Pada tabel 3 dapat dilihat hasil uji persamaan regresi 1 yang digunakan untuk menganalisis pengaruh opini audit terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan nilai adjusted  $R^2$  sebesar 0.415. hal ini berarti 41,5% variabel pendapatan asli daerah dapat dijelaskan oleh variabel opini audit. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 58.5% dijelaskan oleh variabel lain diluar yang diteliti. Hasil uji signifikansi parameter individual (t test) menunjukkan nilai t sebesar 4.645 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0.000. karena probabilitasnya lebih kecil dari 0.05 maka dapat dikatakan variabel opini audit **signifikan**. Hal ini berarti bahwa variabel opini audit berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Pada tabel 3 di hasil uji persamaan regresi 2 yang digunakan untuk melihat pengaruh opini audit terhadap belanja operasi menunjukkan nilai adjust  $R^2$  sebesar 0.219. Hal ini memiliki arti bahwa 21.9% variabel belanja operasi dijelaskan oleh variabel opini audit. Sedangkan sisanya yaitu 71.8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar yang diteliti. Hasil t test pada persamaan regresi 2 memperlihatkan nilai t sebesar 3.019 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0.005 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel opini audit **signifikan**. Hal ini berarti variabel opini audit berpengaruh terhadap belanja operasi.

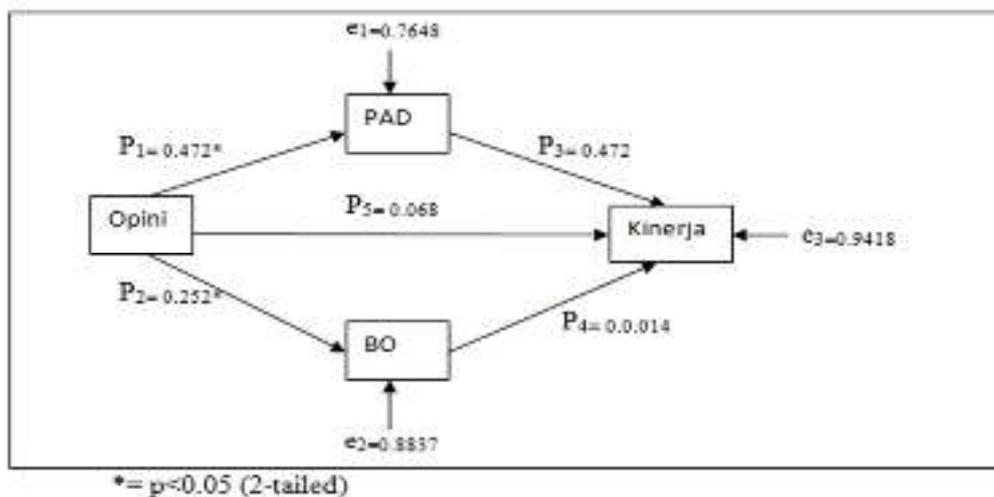
Pada tabel 3 hasil uji persamaan regresi 3 yang digunakan untuk mengetahui pengaruh opinini audit terhadap skor kinerja melalui pendapatan asli daerah dan belanja operasi menunjukkan nilai adjust  $R^2$  sebesar 0.113. Hal ini berarti 11.3% variabel skor kinerja dapat dijelaskan oleh variabel opinin audit, pendapatan asli daerah, dan belanja operasi. Sedangkan sebesar 88.7% dijelaskan oleh variabel lain diluar dari yang diteliti. Hasil t test memperlihatkan bahwa variabel opini audit, pendapatn asli daerah dan belanja operasi tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas signifikan untuk opini audit sebesar 0.256, pendapatan asli daerah sebesar 0.477, dan belanja operasi sebesar 0.908. Ketiganya menunjukkan angka yang lebih besar dari 0.05. Hal ini berarti skor kinerja **tidak dipengaruhi** oleh variabel opini audit, pendapatan asli daerah dan belanja operasi.

Pada hasil uji persamaan regresi 1 menghasilkan nilai standardized beta untuk pengaruh opini audit terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0.472 dan signifikan di bawah 0.05. Nilai standardized

beta 0.472 ini merupakan nilai path atau jalur  $p_1$ . Pada hasil uji persamaan regresi 2 memberikan nilai standardized beta untuk pengaruh opini audit sebesar 0.252 dan signifikansi di bawah 0.05. Nilai standardized beta 0.252 merupakan nilai path atau jalur  $p_2$ . Pada hasil uji regresi 3 menghasilkan standardized beta sebesar 0.068; 0.071; 0.014. Nilai standardized beta 0.068 merupakan nilai path atau jalur  $p_5$  dan signifikansi di atas 0.05. Nilai standardized beta 0.071 merupakan nilai path atau jalur  $p_3$  dan signifikansi di atas 0.05. Nilai standardized beta 0.014 merupakan nilai path atau jalur  $p_4$  dan signifikansi di atas 0.05. Besarnya nilai  $e_1 = \sqrt{1 - 0.415} = 0.7648$ ; besarnya nilai  $e_2 = \sqrt{1 - 0.219} = 0.8837$ ; besarnya nilai  $e_3 = \sqrt{1 - 0.113} = 0.9418$ .

Hasil analisis path menunjukkan bahwa pengaruh opini audit terhadap skor kinerja melalui pendapatan asli daerah dan belanja operasi tidak terbukti.

**Gambar 2**  
**Analisis Jalur**



Sumber: Data sekunder diolah (2018)

Tampilan gambar diatas menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh langsung dari variabel opini audit terhadap skor kinerja dan tidak juga pengaruh tidak langsung variabel opini audit terhadap skor kinerja baik melalui variabel pendapatan asli daerah maupun belanja operasi.

## 5 PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh opini audit terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota provinsi Papua melalui pendapatan asli daerah dan belanja operasi sebagai pemediasi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Opini audit tidak berpengaruh langsung terhadap Kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini menemukan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap skor kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota provinsi Papua. Semakin mencapai opini Wajar Tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah tidak membuat semakin baik kinerja pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Papua. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Andi Chairil (2015) yang menyatakan bahwa opini audit atas LKPD mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah melalui pendapatan asli daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh terhadap realisasi pendapatan asli daerah. Namun, realisasi pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Andi Chairil (2015) yang menyatakan bahwa opini audit berpengaruh secara tidak langsung setelah dimediasi oleh pendapatan asli daerah.
3. Opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah melalui belanja operasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh terhadap belanja operasi. Namun, belanja operasi

tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Hal ini berarti bahwa belanja operasi tidak memediasi hubungan opini audit dan kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Andi Chairil (2015) yang menyatakan bahwa belanja operasi bukanlah variabel yang memediasi hubungan opini audit dan kinerja pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua.

## 5.2 Saran

1. Sampel pada penelitian ini sangat sedikit yaitu hanya 4 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua dengan total observasi sebanyak 30 dari tahun 2011-2016. Pada Penelitian selanjutnya dapat menggunakan Sampel yang lebih banyak dan menguji kembali hasil penelitian ini dalam konteks yang berbeda, misalnya pada Kementrian/Lembaga Negara.
2. Metoda penelitian ini hanya berfokus pada peran mediasi realisasi pendapatan asli daerah dan belanja operasi daerah, yang mana belum mempertimbangkan bagaimana metode penyusunan dan jumlah anggaran serta realisasi jenis pendapatan dan belanja daerah lainnya, sehingga generalisasi penelitiann ini belum sepenuhnya berlaku untuk jenis pendapatan dan belanja daerah lainnya. Penelitian selanjutnya dapat melakuka analisis lebih mendalam terhadap peran mediasi pendapatan dan belanja daerah lainnya, misalnya pendapatan transfer dari pemerintah, belanja modal dan belanja transfer.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Halim. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN
- Budianto, Wendy. 2012. *Pengaruh opini, temuan audit, dan gender terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia 2008-2010*. Skripsi Sarja. FEUI. Depok. [www.ib.ui.ac.id/file?file=digital/20317234-S-Wendy%20Budianto.pdf](http://www.ib.ui.ac.id/file?file=digital/20317234-S-Wendy%20Budianto.pdf)
- Giroux, G., & Shields, D. 1993. *Accounting controls and bureaucratic strategies in municipal government*. *Journal of Accounting and Public Policy*, 12(3), 239-262.
- Gozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Kedelapan. Semarang. Badan Penerbit Universitas Depongoro.
- Marfiana, N., & Kurniasih, L. 2013. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. *Sustainable Kompetitive Advantage (SCA)*, 3(1)
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Mustikarini, W. A., & Fitriyani, D. 2012. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007*. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
- Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Power, M. 2013. *Auditing and The Production Of Legitimacy*. *Accounting, Organizations and Society*, 28, 379-394.
- Schneider, Marguerite and Damanpowur, Variborz. 2002. *Public Choice Economics and Public Pension Plan Funding: and Empirical Test*. *Administration & Society*, 34 (1 Mar) : 57.
- Suchman Mark C. 1995. *Manging Legitimacy: Strategecy and Instutional Approaches*. *Academy Of Management Review*, 20 (3), 571-610.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. tentang Pemerintah Daerah

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara.

